

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

###### a. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Berikut beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:<sup>18</sup>

- 1) Menurut Ife (1995), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- 2) Menurut Parsons, et.al. (1994), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi

---

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ibid...*, hlm 210-224

kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

- 3) Menurut Swift dan Levin (1987), pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- 4) Menurut Rappaport (1984), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ibid...*, hlm 58-60

## b. Indikator Keberdayaan

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan kompetensi partisipatif. *Parsons et.al.* (1994) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:<sup>20</sup>

- 1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- 2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- 3) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indicator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan yaitu:

- 1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke

---

<sup>20</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ibid...*, hlm 215

pasar, fasilitas medis, bioskop rumah ibadah ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras minyak tanah minyak goreng bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut sabun mandi rokok bedak shampo). individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian TV radio koran majalah pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan

keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.

- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam 1 tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seseorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukumhukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.<sup>21</sup>

c. Setrategi Pemberdayaan

*Parsons et. al.* (1994) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas.<sup>22</sup>

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektifitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan: mikro, mezzo, dan makro.

---

<sup>21</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ibid...*, hlm 63-64

<sup>22</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ibid...*, hlm 66

### 1) Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

### 2) Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

### 3) Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategisistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk

memahami situasi situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.<sup>23</sup>

d. Pendekatan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokong, dan pemeliharaan.<sup>24</sup>

1) Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

2) Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

---

<sup>23</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ibid...*, hlm 67-68

<sup>24</sup> *ibid...*, hlm 218-219

### 3) Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan memecah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

### 4) Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

### 5) Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

#### e. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan social:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, ibid...*, hlm 219-220

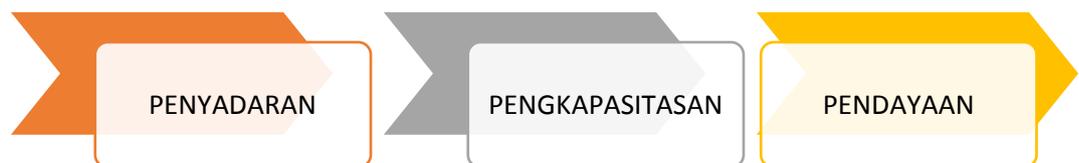
- 1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- 3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan
- 4) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- 5) Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berbeda pada situasi masalah tersebut.
- 6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukung yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- 7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- 8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan

- 9) Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- 10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- 11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

f. Tahapan Pemberdayaan

**Gambar 2.1**

Tahapan Pemberdayaan



### 1) Tahap Penayadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penayadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief*, dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka.

### 2) Tahap Pengkapasiptasan

Yang sering kita sebut "*capacity building*", atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dulu. Pengkapasiptasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Arti dasarnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.

### 3) Tahap Pendayaan

Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Randy R Wrihatnolo & Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm 33-34

g. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:<sup>27</sup>

1) Perbaiki kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.

2) Perbaiki Usaha.

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut,

---

<sup>27</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan masyarakat, ibid...*, hlm 70

sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

### 3) Perbaiki Pendapatan

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

### 4) Perbaiki Lingkungan

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

### 5) Perbaiki Kehidupan

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang

membalik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

#### 6) Perbaiki Masyarakat

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

#### h. Pandangan Al Quran tentang Pemberdayaan Masyarakat

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah prinsip ukhuwwah, prinsip ta’awun, dan prinsip persamaan derajat, prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur’an”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39, 2019, Tasikmalaya.

### 1) Prinsip *Ukhuwwah*

*Ukhuwwah* dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan, *ukhuwwah* merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Karena dalam pemberdayaan memerlukan banyak pihak yang terlibat, jadi pemberdayaan akan terwujud dengan saling membantu satu sama lain.

### 2) Prinsip *ta'awun*

Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Karena pemberdayaan merupakan suatu hal yang bisa menambah kualitas masyarakat menjadi lebih baik maka kita harus saling membantu untuk tercapainya masyarakat yang berdaya.

### 3) Prinsip persamaan derajat

Persamaan derajat antar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi wasilah untuk tolong-menolong dan saling membantu untuk tercapainya pemberdayaan di masyarakat.

#### i. Meningkatkan Disiplin Masyarakat

Berbicara mengenai masalah disiplin, ternyata bahwa disiplin ini merupakan salah satu sumber daya manusiawi yang tersembunyi, tetapi sangat menentukan tercapainya suatu program pembangunan. Disiplin mengandung beberapa unsur, antara lain: unsur patuh, unsur taat, unsur mental, unsur moral, unsur kejujuran, unsur keteraturan (*keajegan*), dan unsur ketertiban. Disiplin dalam arti sempit dapat diartikan dengan pematuhan secara ketat pada peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang sudah disetujui bersama (*strict to the ride*).

Terpenuhinya disiplin secara tepat dan secara teratur tergantung beberapa faktor, antara lain:

- 1) Sifat perorangan, seperti sifat-sifat malas, tidak serius, apatis, kerajinannya, keimanannya, dan sebagainya
- 2) Kondisi atau suasana kehidupan pada suatu waktu tertentu.
- 3) Kebutuhan dan keinginan pada saat tertentu dan sebagainya.

Seseorang yang dapat mematuhi dan menegakkan disiplin mempunyai sifat yang terpuji, karena ia dapat mencegah menurunnya berbagai norma kehidupan yang berarti dapat mensukseskan program pembangunan diri sendiri, program keluarga, program masyarakat, dan program pembangunan bangsa. Disiplin dalam arti luas dapat dikatakan di sini sebagai kumpulan dari berbagai jenis disiplin yang ada, yang secara idiil mendasarkan diri pada Pancasila dan secara konstitusional pada Undang-Undang Dasar 1945 yang ditaati oleh rakyat Indonesia.

j. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif.

Menurut Samuel Paul (1987), partisipasi aktif dan kreatif dinyatakan sebagai, partisipasi mengacu pada sebuah proses aktif yang dengannya kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan ketimbang hanya semata-mata menerima pembagian keuntungan proyek.

Cohen & Uphoff (1990), menyatakan bahwa definisi yang dinyatakan oleh Samuel Paul memandang keterlibatan masyarakat

mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar terhadap situasi dan masalah yang dihadapinya. Selain itu, juga berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai dalam mengatasi masalahnya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam persatuan dunia ekonomi dan politik dinilai sangat strategis dan menentukan.

Friedmann (dalam Soetrisno, 1991), pendekatan keberdayaan berperan penting terhadap pembangunan alternatif. Sebab hal tersebut menempatkan masyarakat untuk memperoleh pengalaman dan penekanan pada otonomi dan pembuatan keputusan dari masyarakat secara teritorial, kemandirian lokal, demokrasi langsung (partisipatori), dan pembelajaran sosial.

Friedmann sebagaimana dikutip oleh Soetrisno (1995), juga mengingatkan bahwa sangatlah tidak realistis apabila kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar masyarakat madani, diabaikan dalam penilaian keberdayaan.

## **2. Bank Sampah**

### **a. Pengertian Bank Sampah**

Secara istilah, Bank Sampah terdiri dari atas 2 (dua ) kata, yaitu secara istilah Bank sampah terdiri atas 2 (dua) kata, yaitu kata Bank dan sampah. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banque* yang berarti tempat penukaran uang. Bank sampah

adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah.<sup>29</sup> Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyeter adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.<sup>30</sup>

Menurut peraturan Menteri Negara RI No 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, dan recycle* melalui Bank Sampah pada pasal 1 disebutkan bahwa Bank Sampah adalah lah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.<sup>31</sup>

Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang akan tetapi dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah harus orang yang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan

---

<sup>29</sup> M Munandar Sulaeman, *Ilmu Sosial Dasar Edisi Revisi, ibid...*, hlm13-14

<sup>30</sup> Abdul Rozak, *Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014). Hal. 23.

agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja bank sampah pengelolaan sampahnya berbasis rumah tangga, dengan memberikan *reward* kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah.

Konsep bank sampah mengadopsi manajemen bank pada umumnya. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat dan anak-anak.<sup>32</sup> Metode bank sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan. Nasabah bank sampah adalah individu, komunitas atau kelompok yang berminat menabungkan sampahnya pada bank sampah. Individu biasanya perwakilan dari kepala keluarga yang mengumpulkan sampah rumah-tangga. Komunitas atau kelompok, adalah kumpulan sampah dari satu Rukun Tetangga (RT), atau sampah dari sekolah-sekolah dan perkantoran.

Bank Sampah Manfa'at Desa Bolorejo sebagai objek penelitian, memiliki sistem yang sama dengan konsen diatas. Namun, dengan konsep yang sama ada yang berbeda perihal kreativitas pengelola dalam mengolah hasil tabungan sampah dan menjualnya sehingga memiliki *value* yang lebih.

---

<sup>32</sup> Abdul Rozak, *ibid...*, hlm 25

## b. Prinsip Dasar

Mulai dari rumah tangga sebagai awal timbunan, sampah dilakukan pemilahan sesuai jenisnya (kertas, plastik, kaleng/botol). Setelah sampah dipilah dari rumah, kemudian masyarakat membawa sampah ke bank sampah untuk ditabung. Penabung akan dilayani oleh petugas bank sampah yang disebut *teller* yang berasal dari masyarakat. Secara berkala sampahsampah yang ditabung akan dibeli oleh pengepul dan pengepul akan memberikan nilai ekonomi setiap sampah. Kemudian, uang hasil perolehan penjualan sampah diberikan ke teller untuk dimasukkan ke buku tabungan sampah masing-masing penabung.

Terdapat tiga komponen utama dalam pengelolaan sampah dengan tabungan sampah di bank sampah, yaitu penabung, petugas/*teller*, dan pengepul. Pengelolaan sampah dengan bank sampah selain menabung sampah, di dalamnya juga ada juga memberdayakan masyarakat untuk mengurangi sampah yang mereka hasilkan, memanfaatkan sampah, dan melakukan daur ulang sampah.<sup>33</sup>

## c. Kajian Pengelolaan Sampah

### 1) Ditinjau dari aspek kesehatan

---

<sup>33</sup> Bambang Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), hlm. 24

- a) Dapat menciptakan rumah menjadi bersih, sehat, dan bebas dari sampah.
  - b) Mengurangi kebiasaan membakar sampah sehingga dapat mengurangi terjadinya pencemaran udara yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan.
  - c) Mengurangi pencemaran air terutama air sumur gali dari sampahsampah anorganik yang biasanya ditimbulkan oleh masyarakat.
  - d) Mengurangi risiko gangguan kesehatan pemulung yang ada di TPA.
  - e) Bank sampah dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 2) Ditinjau dari aspek pendidikan
- a) Sampah yang dikumpulkan sudah terpilah antara sampah upaya edukasi masyarakat untuk memilah sampah, sehingga mereka peduli terhadap lingkungan.
  - b) Menabung sampah dapat membiasakan anak-anak untuk menabung, sehingga mereka memahami betul arti pentingnya menabung ketika mereka beranjak dewasa. Mereka memaknai sampah yang mereka hasilkan.

### 3) Ditinjau dari aspek sosial ekonomi

- a) Dapat menambah penghasilan keluarga dari tabungan sampah.
- b) Dapat mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat.
- c) Dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul untuk mencari sampah.
- d) Menciptakan wirausahawan baru dibidang pembeli sampah/ pengepul, karena kehadiran bank sampah di masyarakat akan membutuhkan hadirnya pengepul-pengepul baru di suatu wilayah, sehingga dapat meningkatkan strata perekonomian di masyarakat. Bank sampah akan dapat mengurangi jumlah pemulung yang mencari sampah, dan menambah jumlah pengepul sampah.<sup>34</sup> Dalam jangka panjang masyarakat yang berprofesi pemulung akan beralih menjadi pengepul.

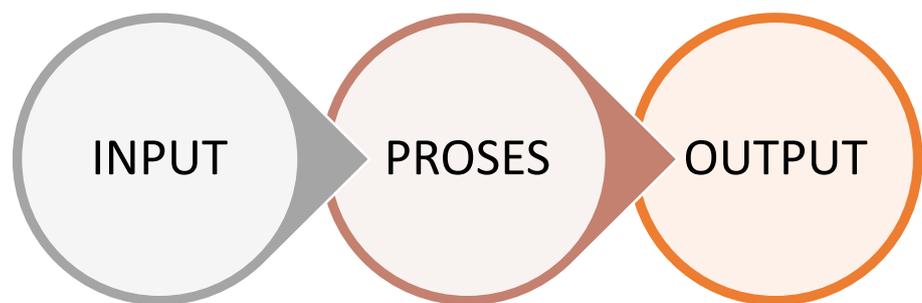
### 4) Indikator Keberhasilan

Keberhasilan dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan tabungan sampah di bank sampah, menggunakan indikator keberhasilan dengan mengikuti alur sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Bambang Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*, *ibid.*, hlm. 24-26

**Gambar 2.2**  
Alur Kesisteman Indikator Keberhasilan Bank Sampah



a) Input

Ada tidaknya pengelola bank sampah yang berpartisipasi di dalam pengelolaan bank sampah serta ada tidaknya peralatan yang digunakan dalam menjalankan sistem tabungan sampah di bank sampah.

b) Proses

Berjalan tidaknya mekanisme pelayanan tabungan sampah baik secara individual maupun secara komunal.

c) Output

Indikator keberhasilan pada *fase output* adalah Jumlah penabung, jumlah sampah yang ditabung, kondisi lingkungan rumah, jumlah uang yang ditabung dan Pihak yang tertarik dengan tabungan sampah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*, *ibid.*, hlm. 45-47

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bank Sampah

1) Faktor pendukung adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

a) Faktor Internal

Pertama, Keterlibatan anggota. Dengan adanya beberapa masyarakat sekitar yang berpartisipasi penuh dan bersedia menjadi anggota untuk menjalankan program kegiatan yang telah ditentukan secara nyata dapat membantu proses berjalannya program untuk dapat tercapainya secara maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kedua, Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam proses berjalannya suatu program. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diharapkan akan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal secara berkesinambungan.

b) Faktor Eksternal

Pertama, Adanya keterlibatan masyarakat merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu program. Dengan adanya dukungan masyarakat ini akan mampu menunjang berjalannya suatu program. Adanya keterlibatan ini akan tercipta suasana yang

---

<sup>36</sup> Anggraini dan Ayu Dewanti “Strategi Inovatif Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol.3. Kediri

baik dalam koordinasi antara masyarakat dengan pengurus.

Kedua, Kerjasama dengan pihak lain akan sangat menunjang terlaksananya kegiatannya dengan baik, dalam hal fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalanka tujuan bank sampah.

2) Faktor penghambat adalah sebagai berikut:

- a) Ketidak disiplin nasabah Program pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh bank sampah akan mendapat kendala apabila masyarakat tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh bank sampah dalam hal menabung sampah.
- b) Rendahnya *mindset* yang dimiliki masyarakat sekitar  
Pemikiran masyarakat yang tidak terbuka terhadap program yang ada menjadi kendala bagi pelaksanaan. Karenanya diperlukan cara untuk dapat mengubah *mindset* masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.

### **3. *Green Economy***

#### **a. Pengertian *Green Economy***

Ekonomi hijau (*green economy*) adalah paradigma ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan

secara signifikan. *Green economy* juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menimbulkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam (SDA) dan berkeadilan sosial.<sup>37</sup>

Konsep ekonomi hijau (*green economy*) sangat baik untuk diterapkan dikarenakan memiliki manfaat untuk menjaga kondisi lingkungan tetap stabil, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara merata dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konsep *Green economy* bukan pengganti pembangunan berkelanjutan, melainkan penegasan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai dengan memastikan hidup dalam konsep perekonomian yang tepat.<sup>38</sup> Beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan terwujudnya konsep *green economy*, maka masyarakat memiliki peran yang penting dalam upaya mewujudkan gerakan ini.

Dalam kaitannya dengan perkembangan *green economy* yang saat ini dianggap sebagai paradigma baru dalam ilmu ekonomi, telah diadakan suatu pertemuan yang membahas tentang “*Green Economy ; A Pathway to Sustainable*

---

<sup>37</sup> Hijauku, dalam <http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial>. (Diakses pada hari Minggu, 14 Februari 2021 pukul 08.17 WIB).

<sup>38</sup> Ika Yunia Fauzia, “Urgensi Implementasi *Green Economy* Perspektif Pendekatan *Dharuriyah* Dalam *Maqashid Al-Shariah*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 90

*Development*".<sup>39</sup> Pertemuan tersebut diadakan pada sidang umum PBB pada 2 Juni 2011 di New York, Amerika Serikat. Pada kegiatan tersebut, banyak perhatian yang tertuju dari berbagai negara berkembang maupun negara-negara maju yang masing-masing melontarkan pendapat maupun pemikiran mereka untuk memberikan masukan bagi pelaksanaan *green economy*.

Beberapa pembicara terlibat dalam pertemuan tersebut, diantaranya terdapat Joseph Deiss, yang merupakan pimpinan sidang umum PBB. Joseph Deiss dengan antusias membicarakan permasalahan "*Economic Growth*" pada negara-negara berkembang. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu, masih digunakannya energi berupa fosil fuel dan sumber-sumber energi yang tidak terbarukan. Joseph Deiss juga memperingatkan bahwa konsep *green economy* yang saat ini marak digaungkan di berbagai Negara memiliki peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi, seperti halnya penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mewujudkan produk pelayanan "hijau", yang dikatakan mampu memperbaiki kesalahan pada masa lalu dalam penggunaan sistem di negara berkembang.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Bappeda Kabupaten Bandung, "Penyusunan Perencanaan Green Economy Di Kota Bandung", (Laporan Akhir, 2014), h. 19.

<sup>40</sup> Bappeda Kabupaten *ibid.*, hlm 20

Pakar *green economy* Paul Hawken, menyebutkan bahwa krisis yang terjadi pada bidang sosial maupun lingkungan yang saat ini melanda dunia bukanlah permasalahan pada pengelolaannya, namun permasalahan rancangannya sehingga dibutuhkan perombakan pada seluruh sistemnya. Paul Hawken menambahkan bahwa *Green Economy* (Ekonomi Hijau) bukan hanya merupakan permasalahan lingkungan, dan sudah seharusnya masyarakat bergerak untuk menciptakan keharmonisan dengan sistem alam, untuk membuat perekonomian mengalir secara alamiah seperti berlayar dengan tiupan angin dari suatu ekosistem.<sup>41</sup>

Konsep *Green Economy* saat ini sedang digencarkan di berbagai daerah di seluruh dunia, salah satunya Negara Indonesia. Indonesia yang merupakan negara berbentuk Republik dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki tentu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni agar tercapai tujuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam menghadapi era *Green Economy*.

Dengan demikian, maka konsep *green economy* merupakan kegiatan perekonomian yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir, namun juga diharapkan memberikan dampak tercapainya

---

<sup>41</sup> *ibid.*, hlm 22

keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam (SDA) itu sendiri.<sup>42</sup>

b. Prinsip *Green Economy*

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum serta individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk dijadikan landasan berpikir ataupun landasan bertindak.<sup>43</sup>

Berikut penjabaran dari prinsip-prinsip green economy, antara lain:<sup>44</sup>

- 1) Mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik serta kualitas yang merupakan prinsip dasar dari *green economy* sebagai ekonomi pelayanan yang fokus pada hasil akhir dan kebutuhan lingkungan. Bahan utama yaitu sarana untuk mencapai kepuasan akhir dari kebutuhan riil, dan secara radikal dapat dikonversikan. Uang juga harus tetap berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pembaharuan dari pertukaran kegiatan perekonomian. Jika hal ini dapat dilaksanakan secara signifikan pada kegiatan

---

<sup>42</sup> Ida Nurlinda, “Konsep Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”, hlm. 7

<sup>43</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 896

<sup>44</sup> Surna Tjahja D, Sutanto H, *Demi Bumi, Demi Kita Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*, (Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013), hlm. 201

ekonomi, maka kekuatan nilai uang pada seluruh kegiatan ekonomi dapat diminimalisir.

- 2) Mengikuti aliran alam, yang artinya ekonomi mengalami pergerakan yang diibaratkan kapal berlayar melalui adanya tiupan angin sebagai suatu proses yang berjalan secara alami. Tidak hanya solar dan energi yang harus diperbaharui, namun juga diiringi siklus hidrologi yang alamiah, vegetasi regional dan jaring-jaring makanan, serta dengan material lokal, sehingga masyarakat dapat lebih mengerti mengenai aspek ekologi.
- 3) Sampah adalah makanan, yaitu alam tidak mengenal sampah sehingga setiap keluaran suatu proses menjadi asupan untuk proses yang lain. Prinsip ini tidak hanya memiliki implikasi ganda pada tingginya kompleksitas organisasi, namun juga keluaran produk sampingan harus cukup bergizi dan tidak memiliki toksin, sehingga dapat menjadi asupan bagi kegiatan yang lain.
- 4) Rapi dan memiliki keberagaman fungsi, jaring-jaring makanan yang kompleks merupakan dampak dari berbagai hubungan yang terintegrasi, dimana secara diametris bertolak belakang dengan segmentasi dan fragmentasi masyarakat industri. Dalam hal ini, setiap strategi

penyelesaian masalah bertumpu pada keberhasilan bersama serta nilai positif dari kegiatan lain.

- 5) Skala tepat guna/skala keterkaitan, hal ini tidak hanya mengandung arti bahwa "*small is beautiful*" (kecil itu indah), namun juga mengandung arti bahwa setiap aktivitas generatif mempunyai skala operasional yang paling tepat guna. Aktivitas yang kecil pun akan memiliki dampak lebih besar. Hal ini juga merupakan aktivitas ekologi yang murni, yaitu suatu perencanaan terintegrasi dalam skala berganda dan merefleksikan pengaruh yang besar terhadap hal yang kecil juga sebaliknya.
- 6) Keanekaragaman dalam dunia dengan perubahan yang berkelanjutan, kesehatan dan stabilitas akan tergantung pada keanekaragaman. Hal ini berlaku untuk semua tingkatan/keanekaragaman (jenis tumbuhan, binatang, ekosistem dan regional), juga keanekaragaman sosial dan organisasi ekologis.
- 7) Kemampuan diri, organisasi diri, dan rancangan diri, merupakan suatu sistem yang kompleks membutuhkan "hirarki sarang" dari intelegensia yang mengatur sistemnya sendiri dalam suatu gerakan terstruktur.
- 8) Partisipasi dan demokrasi secara langsung, agar dapat fleksibel dan tangguh, dikarenakan rancangan ekonomi

yang berbasis ekologi harus menyertakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

9) Kreativitas dan pengembangan masyarakat. Mengubah tempat sumber produksi menuju suatu produktivitas alam yang secara spontan membumikan kreativitas.

10) Konversi ekonomi hijau harus radikal, tetapi juga harus bertahap dan dapat mengalami pertumbuhan serta berulang. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan perubahan lansekap ekologi sebagai pemahaman dasar untuk mengubah ekonomi konvensional menjadi ekonomi hijau (*Green Economy*).

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Roza Linda	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan daur ulang sampah plastik di Bank Sampah Berlian berjalan cukup baik. Kegiatan daur ulang sampah plastik di Bank Sampah Berlian telah memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat dan anggotanya antara lain manfaat yang dirasakan oleh masyarakat selain

				manfaat sosial juga manfaat ekonomi.
2	Yunny Noevita Sary	Hegemoni Ekonomi Syaria	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses perkembangannya, BSS melakukan berbagai bentuk hegemoni yang menyangkut hegemoni secara intelektual dan hegemoni moral. Hegemoni intelektual dapat berupa mengubah sampah menjadi rupiah, mewujudkan UINSA Surabaya sebagai kampus hijau dan bersih serta mengubah mindset melalui sistem 3R (Reduse, Reuse, dan Recycle). Sedangkan hegemoni moral meliputi daya tarik ekonomi syariah dan produk – produk Bank Sampah Syariah (BSS). Melalui bentuk-bentuk hegemoni juga dapat diketahui proses hegemoni ekonomi syariah yang diterapkan pada setiap nasabah mempunyai pengaruh yang berbeda.
3	Anih Sri Suryani	Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)	Kualitatif	Program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah, telah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah dan masyarakat. Solusi untuk mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali. Sosialisasi

				<p>pengelolaansampah mandiri melalui Bank Sampah, sampai saat ini masih gencar dilakukan oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, dalam proses pengelolaannya, bank sampah memiliki mekanisme relasi dan jaringan sosial yang bernilai ekonomis</p>
4	Fika Fitriasaki	<p>Analisis Pengaruh Bank Sampah Malang (BSM) Terhadap Pendapatan Masyarakat Kota Malang</p>	Kualitatif	<p>Tabungan Bank Sampah Malang tidak mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri, karena hasil uji F tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwatabungan BSM belum menjadi sumber pendapatan utama Masyarakat Kelurahan Gading Kasri.</p>
5	Abdul Rozak, (2014)	<p>Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah</p>	<p>Metode analisis kualitatif dengan teknik pengolahan data berupa klasifikasi data</p>	<p>Dampak sosial yang timbul dengan adanya Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, saling membantu antar nasabah serta terciptanya lingkungan yang bersih.</p>
6	MitaNovianty, Usu (2014)	<p>Dampak Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai,</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan analisa kuantitatif</p>	<p>Dampak lingkungan dengan adanya bank sampah diakui sebagian responden telah memberikan perbaikan kebersihan lingkungan yaitu sebanyak 30</p>

		Kecamatan Medan Denai, Kota Medan		responden (100 %) dan juga memberikan manfaat langsung dengan berkurangnya tumpukan sampah di lingkungan yang diakui oleh 28 responden (93,3 %)
7	Ni Made Via Prayati dan I Nengah Kartika	Analisis Pengaruh Program Bank Sampah Terhadap Pendapatan Nasabah Bank Sampah di Kota	Kuantitatif	Hasil penelitian adalah secara simultan partisipasi nasabah, tabungan sampah dan hasil penjualan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah bank sampah, sedangkan secara parsial partisipasi nasabah idak berpengaruh signifikan dan tabungan sampah, hasil penjualan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah bank sampah di Kota Denpasar